

BAB II

LANDASAN TEORI

2. 1. Definisi Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Ekonomi

Salah satu indikator yang penting dalam menganalisa pembangunan ekonomi di suatu Negara adalah pertumbuhan ekonomi. Pada dasarnya pengertian tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi mempunyai makna yang berbeda. Menurut Arsyad (1985), pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak.

Schumpeter membedakan pengertian pertumbuhan (*growth*) dan pembangunan ekonomi (*development*). *Growth* diartikan sebagai peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi masyarakat, tanpa adanya perubahan cara – cara atau teknologi produksi itu sendiri, misalnya : kenaikan output yang disebabkan oleh pertumbuhan stok modal tanpa perubahan teknologi yang lama. Sedangkan *development* adalah kenaikan output yang disebabkan oleh inovasi yang dilakukan oleh wiraswasta, di mana inovasi berarti perbaikan teknologi dalam arti luas yang mencakup penemuan produk baru, pembukaan pasar baru, dan sebagainya (Arsyad,1992 : 215).

Pertumbuhan ekonomi juga dapat dihitung melalui pendapatan nasional, seperti PDB / PNB. Dalam penelitian ini dasar ukuran yang dipakai untuk menghitung pertumbuhan ekonomi adalah PDRB, karena PDRB lebih lazim digunakan mengingat batas wilayah perhitungan yang terbatas pada daerah yang bersangkutan (domestik).

2.2.Pentingnya Akumulasi Modal Dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Jhingan (1999), pembentukan / akumulasi modal (*Capital Formation*) sebagai penentu utama pertumbuhan ekonomi. Akumulasi modal adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikonsumsi dan digunakan dalam proses produksi. Menurut Nurske (Jhingan, 1999 : 337), masyarakat tidak mempergunakan seluruh aktifitas produktifnya saat ini untuk kebutuhan dan keinginan konsumsi, tetapi menggunakan sebagian saja untuk pembuatan barang modal. Inti dari akumulasi modal adalah pengalihan sebagian sumber dana yang sekarang ada pada masyarakat ke tujuan untuk meningkatkan persediaan barang modal begitu rupa, sehingga memungkinkan perluasan output yang dapat dikonsumsi pada masa depan.

Akumulasi modal meliputi modal material dan modal manusia (Jhingan, 1999 : 337) dan menurut Singer (Jhingan, 1999 : 337) pembentukan modal terdiri dari barang nampak seperti pabrik, alat – alat mesin maupun barang – barang yang tidak tampak seperti pendidikan, kesehatan, tradisi ilmiah dan penelitian. Dapat dikatakan modal berperan

sangat penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi. Modal atau *capital* merupakan faktor penting dalam memproduksi barang – barang modal yang dihasilkan untuk membantu manusia di dalam proses produksi. Barang – barang modal juga dinilai dengan uang, sehingga pada umumnya modal tersebut juga dinyatakan dalam jumlah uang. Sedangkan sumber modal dapat berasal dari dalam maupun luar negeri. Modal yang berasal dari dalam negeri dapat berupa PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) dan tabungan domestik, sedangkan modal yang berasal dari luar negeri dapat berupa Penanaman Modal Asing (PMA) dan bantuan luar negeri (Sukirno, 1998 : 35).

2.3. Teori Investasi Keynes

Di dalam bukunya *The General Theory of Employment, Interest and Money* (1936), Keynes mendasarkan teori tentang permintaan investasi atas konsep efisiensi marjinal kapital (*marginal efficiency of capital* atau MEC). MEC dapat didefinisikan sebagai tingkat perolehan bersih yang diharapkan (*expected net rate of return*) atas pengeluaran kapital tambahan, tepatnya MEC adalah tingkat diskonto (*discount rate*) yang menyamakan aliran perolehan yang diharapkan di masa yang akan datang dengan biaya sekarang dari kapital tambahan.

Secara matematis, MEC dapat dinyatakan dalam bentuk formula sebagai berikut (Nanga, 2001 : 125) :

$$C_k = \frac{R_1}{(1+MEC)^1} + \frac{R_2}{(1+MEC)^2} + \dots + \frac{R_n}{(1+MEC)^n} \dots\dots\dots(1)$$

Di mana :

R = perolehan yang diharapkan (*expected return*) suatu proyek

C_k = biaya sekarang (*current cost*) dari modal tambahan

n = tahun ke - n .

Keputusan dilakukan atau tidaknya investasi sangat tergantung pada perbandingan antara PV (*present value*) di satu pihak dan C_k di lain pihak.

Apabila $PV > C_k$, maka diputuskan investasi dilakukan dan sebaliknya.

$$PV = \frac{R_1}{(1+i)^1} + \frac{R_2}{(1+i)^2} + \dots + \frac{R_n}{(1+i)^n} \dots\dots\dots(2)$$

Bila persamaan (2) dan (1) disubstitusikan maka investasi akan dilakukan jika :

$$PV = \frac{R_1}{(1+i)^1} + \frac{R_2}{(1+i)^2} + \dots + \frac{R_n}{(1+i)^n} > \frac{R_1}{(1+MEC)^1} + \frac{R_2}{(1+MEC)^2} + \dots + \frac{R_n}{(1+MEC)^n} \quad (3)$$

yakni jika tingkat perolehan bersih yang diharapkan lebih besar dari biaya peminjaman dana (*cost of borrowing funds*) atau *opportunity cost* dari penggunaan dana yang dimiliki oleh perusahaan, atau tingkat bunga (i), atau jika $MEC > i$.

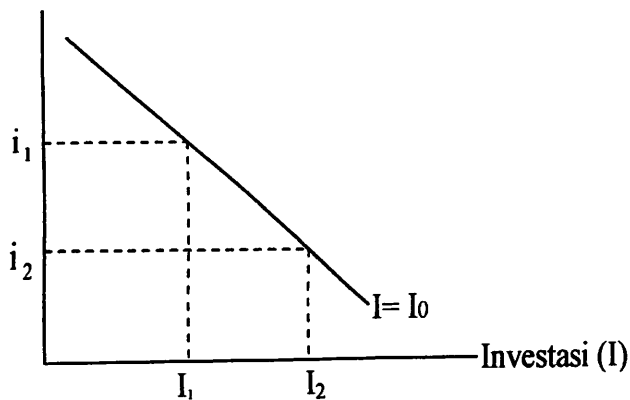
Sedangkan hubungan antara permintaan investasi dan tingkat bunga (i) dengan MEC tertentu oleh Keynes dinyatakan dalam fungsi sebagai berikut :

$$I = f(i) \dots\dots\dots(4)$$

Secara grafik, hubungan antara investasi dan tingkat bunga dapat digambarkan sebagai berikut (Nanga, 2001 : 126):

Gambar 2.1
Kurva Fungsi Investasi (MEC)

Tingkat Bunga (i)



Gambar diatas menunjukkan apabila tingkat bunga turun dari misalnya i_1 ke i_2 akan menyebabkan permintaan investasi meningkat dari I_1 ke I_2 , dan hal yang sebaliknya.

2.4. Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Keuangan Daerah

Sebagaimana diatur dalam UU No.22 tahun 1999, Pendapatan Asli Daerah diartikan sebagai bagian dari sumber pendapatan daerah yang merupakan cerminan dari usaha untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Pendapatan Asli daerah ini terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMN, penerimaan dinas dan penerimaan lain – lain yang sah (UU Otonomi Daerah, 1999 : 10). Semua penerimaan tersebut merupakan sumber penerimaan murni daerah dan peranannya dalam keuangan daerah merupakan salah satu tolok ukur

pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab.

Menurut UU No.5 tahun 1974 pasal 55 yaitu tentang pokok – pokok keuangan daerah, disebutkan bahwa sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah adalah :

1) Pajak Daerah

Pengertian pajak daerah ialah pajak negara yang diserahkan kepada daerah untuk dipungut berdasarkan undang – undang yang dipergunakan guna membiayai pengeluaran daerah . Pajak daerah yang dikelola oleh Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi : pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak rumah tangga atau tunggakan pajak.

2) Retribusi daerah

Pengertian retribusi daerah menurut pasal 37 UU No.2 tahun 1948 adalah pungutan pendapatan oleh pemerintah sebagai pengganti (kerugian) yang diberikan oleh daerah kepada siapa saja yang membutuhkannya. Pemungutan retribusi daerah berlandaskan pada pasal 58 UU No. 5 tahun 1974 dan UU darurat No. 12 tahun 1957.

Penerimaan retribusi sangat dipengaruhi oleh jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan yang diperlukan masyarakat. Sumber retribusi daerah yang dikelola Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi : tempat pelelangan ikan, tempat rekreasi, parkir, rumah sakit, dll.

3) Bagian Laba Badan Usaha Milik daerah (BUMD)

Sumber Pendapatan Asli Daerah selanjutnya adalah laba BUMD. Dalam hal ini, laba perusahaan daerahlah yang diharapkan sebagai sumber pemasukan daerah. Perusahaan BUMD adalah perusahaan yang modalnya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang – undang.

Landasan bagi pendirian perusahaan daerah bertumpu pada UU No. 5 tahun 1962. Adapun tujuan perusahaan daerah menurut pasal 5 UU No. 5 tahun 1962 adalah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi umumnya untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta ketenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur. Beberapa perusahaan daerah yang dikelola oleh Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu : Bank Pembangunan Daerah, PD. Aneka Industri, PD. Tarumartani, jasa Anindya, dll.

4) Penerimaan Dinas

Dinas daerah mempunyai tugas dan fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa terlalu memperhitungkan untung rugi, tetapi dalam batas – batas tertentu dapat didayagunakan dan bertindak sebagai organisasi ekonomi yang memberikan jasa dan imbalan. Penerimaan dinas Daerah Istimewa

Yogyakarta meliputi : Dinas kesehatan, Dinas Peternakan, Perikanan, dll.

5) Penerimaan Lain – lain

Penerimaan ini adalah penerimaan daerah yang sah sesuai dengan Peraturan daerah (PERDA). Bagi keuangan daerah, pemasukan dari pos ini tidak terlalu besar, namun diharapkan mampu untuk membiayai pengeluaran rutin yang dilaksanakan. Penerimaan lain – lain yang sah untuk Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain : jasa giro, penerimaan sewa gudang, hasil penjualan milik daerah, dll.

2.5. Penentuan Pendapatan Dalam Model Makro Ekonomi Empat Sektor

Di dalam membangun model makroekonomi empat sektor ini, diasumsikan bahwa :

- 1) Perekonomian adalah terbuka dimana terdapat perdagangan luar negeri
- 2) Penerimaan pajak terdiri dari pajak *lump – sum*
- 3) Penerimaan pajak tidak bergantung pada tingkat pendapatan nasional dan tidak terdapat tranfer (*transfer payments*).

Berdasarkan asumsi tersebut, maka persamaan – persamaan struktural untuk model makroekonomi empat sektor ini adalah sebagai berikut (Nanga, 2001 : 98) :

$$Y = C + I + G + (X - M) \quad (\text{syarat keseimbangan}) \dots\dots\dots (1)$$

$$C = a + bY_d \dots\dots\dots (2)$$

$$Y_d = Y - T \dots\dots\dots (3)$$

$$T = T_0 \dots\dots\dots(4)$$

$$I = I_0 \dots\dots\dots(5)$$

$$G = G_0 \dots\dots\dots(6)$$

$$X = X_0 \dots\dots\dots(7)$$

$$M = M_0 + mY \dots\dots\dots(8)$$

Apabila nilai dari peubah C, I, G, X dan M di atas disubstitusikan ke dalam syarat keseimbangan persamaan (1), maka akan diperoleh formula untuk menentukan tingkat pendapatan nasional keseimbangan di dalam model makroekonomi empat sektor yaitu (Nanga, 2001 : 99) :

$$Y = \frac{1}{1-b+m} (a - b T_0 + I_0 + G_0 + X_0 - M_0) \dots\dots\dots(9)$$

Di mana m menunjukkan kecenderungan mengkonsumsi marjinal (*marginal propensity to import* atau MPM), X_0 menunjukkan besarnya ekspor otonom dan M_0 menunjukkan besarnya impor otonom.

Dalam model makro empat sektor ini, pajak adalah bersifat eksogen (*exogenous*), maka pengganda konsumsi otonom, investasi, pengeluaran pemerintah, pajak ekspor dan impor akan menjadi (Nanga, 2001 : 100) :

$$\text{Pengganda konsumsi (} k_c \text{)} = \frac{\Delta Y}{\Delta C} = \frac{1}{1-b+m} \dots\dots\dots(10)$$

$$\text{Pengganda investasi (} k_i \text{)} = \frac{\Delta Y}{\Delta I} = \frac{1}{1-b+m} \dots\dots\dots(11)$$

$$\text{Pengganda Pengeluaran pemerintah (} k_g \text{)} = \frac{\Delta Y}{\Delta G} = \frac{1}{1-b+m} \dots\dots\dots(12)$$

$$\text{Pengganda pajak (} k_t \text{)} = \frac{\Delta Y}{\Delta T} = \frac{-b}{1-b+m} \dots\dots\dots(13)$$

$$\text{Pengganda Ekspor (} k_x \text{)} = \frac{\Delta Y}{\Delta X} = \frac{1}{1-b+m} \dots\dots\dots(14)$$

$$\text{Pengganda impor (} k_m \text{)} = \frac{\Delta Y}{\Delta M} = \frac{-1}{1-b+m} \dots\dots\dots(15)$$